



RANCANGAN AKHIR



DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PROBOLINGGO



RENJA 2023

E
G
S
Y
E
N
D
Z
W



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan hidayah dan karunia yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dapat dilaksanakan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) ini disusun merupakan acuan perencanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dalam penentuan program dan kegiatan Tahun 2023. Di dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan ini mengacu pada kebijakan prioritas pembangunan yang dituangkan pada RKPD Kota Probolinggo tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo 2019 – 2024.

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2023 dalam penerapan Akuntabilitas Instansi Pemerintah adalah merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan amanat yang diemban Dinas Perhubungan Kota Probolinggo sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), Peraturan Kementerian Perhubungan PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sinkronisasi Program, Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tahun 2023 serta dikukuhkan dengan Peraturan Walikota Nomor 143 Tahun 2018 tentang Tahapan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Tahunan Kota Probolinggo.

Harapan kami semoga Renja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapan terimakasih

Probolinggo, Juli 2022
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PROBOLINGGO

AGUS EFENDI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730909 199201 1 001



DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	17
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	30
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	33
3.4. Program dan Kegiatan	35
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	43
BAB V : PENUTUP	50

DAFTAR TABEL



Tabel TC-29.....	6
Tabel TC-30.....	16
Tabel TC-31.....	18
Tabel TC-32.....	28
Tabel TC-33.....	37



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2023 adalah sebuah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Probolinggo yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 serta RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024.

Rencana Kerja ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2024 secara berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Kerja ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan strategis serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan selama Tahun 2023 Rencana Kerja ini merupakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dalam pelaksanaannya menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo yang disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) amatlah penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun karena didalamnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD OPD Tahun 2023 dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan tetap memperhatikan upaya pemecahan masalah secara faktual utamanya yang berkembang di masyarakat serta dengan mengupayakan, mengakomodir dan memperhatikan hasil Musrenbang Kota Probolinggo Tahun 2023.





1.2. Landasan Hukum

Dokumen RENJA ini merupakan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota Probolinggo. Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, RENJA ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999;



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024;
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 49 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023;
13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 143 Tahun 2018 tentang Tahapan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Tahunan Kota Probolinggo.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah khususnya di Kota Probolinggo.

Sedangkan Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2023 adalah sebagai :



- Menjabarkan arah RPJMD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2019 – 2024 kedalam rencana instansional;
- Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja sekaligus sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kota Probolinggo;
- Menyediakan dokumen rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
- Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2023 disusun dengan tata urut penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun Lalu (n-2) dan Capaian RENSTRA OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal OPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP





BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA

RENJA Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2022 terdiri dari 3 (tiga) Program dan 19 (Sembilan belas) Kegiatan. Dari jumlah Program dan Kegiatan tersebut yang terakomodir pada penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 adalah 3 (Tiga) Program dan 19 (Sembilan belas) Kegiatan, selanjutnya pada penyusunan RKA Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 3 (Tiga) Program dan 19 (Sembilan belas) Kegiatan, dan pada penyusunan DPA Tahun Anggaran 2022 terealisasi menjadi 3 (Tiga) Program dan 19 (Sembilan belas) Kegiatan. Ketidaksesuaian antara jumlah program dan kegiatan pada saat penyusunan RENJA dengan KUA-PPAS, RKA dan DPA disebabkan karena jumlah pagu anggaran yang diterima oleh Dinas Perhubungan pada saat penyusunan DPA jauh lebih kecil dari yang diusulkan pada RENJA, KUA-PPAS maupun RKA sehingga beberapa program dan kegiatan tidak mendapat alokasi anggaran, oleh karena itu dilakukan penyederhanaan jumlah kegiatan pada tahun 2022. Dari total anggaran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo pada Tahun 2022 sebesar Rp. 24.932.362.765,00 dengan Realisasi sebesar Rp. ,00 dengan persentase sebesar%





Tabel TC-29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra DINAS PERHUBUNGAN s.d. Tahun 2023
Kota Probolinggo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun Berjalan	
					Target RENJA Tahun 2023	Realisasi RENJA Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar-Perhubungan									
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Percentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	90	-	90%	-	-	90%		
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	90	-	88%	-	-	86%		
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	6	-	6 Dokumen	-	-	6 Dokumen		





2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	4	-	4 Laporan	-	-	4 Laporan			
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	100	-	100%	-	-	100%			
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Percentase Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu	100	-	100%	-	-	100%			
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	100	-	100%	-	-	100%			
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	7	-	9 Laporan	-	-	9 Laporan			
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	0	-	0 Dokumen	-	-	12 Dokumen			
2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen peatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	0	-	0 Dokumen	-	-	12 Dokumen			
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan	40	-	40%	-	-	40%			
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai	50	-	50%	-	-	40%			





2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	100	-	-	-	-	100%		
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Percentase peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100	-	100%	-	-	100%		
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Percentase Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi	100	-	100%	-	-	100%		
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Percentase realisasi barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100	-	100%	-	-	100%		
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	48	-	36 Eksemplar	-	-	36 Eksemplar		
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Percentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	100	-	100%	-	-	100%		
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Percentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	-	100%	-	-	100%		





2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	-	0 unit	-	-	0 unit		
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah realisasi kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	0	-	1 Unit	-	-	0 Unit		
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	0	-	1 Unit	-	-	6 Unit		
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi	100		100%	-	-	100%		
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Percentase Jasa Surat Menyurat yang terpenuhi	100		100%	-	-	100%		
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Percentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	100		100%		-	100%		
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Percentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi	100		100%		-	100%		
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Percentase Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	100		100%		-	100%		
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase BMD dalam kondisi baik	100		100%		-	100%		
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam kondisi layak	100		100%		-	100%		
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Percentase kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam kondisi layak	100		100%		-	100%		
2.15.01.2.09.03	Pemeliharaan Mebel	Percentase Mebel dalam kondisi baik	100		100%		-	0%		
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Percentase Peralatan dan Mesin Lainnya dalam kondisi baik	100		100%		-	100%		





2.15.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Aset Tetap Lainnya dalam kondisi baik	100		100%		-	100%		
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dalam kondisi baik	100		100%		-	0%		
							-			
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase Sarana dan Prasarana Perlengkapan jalan sesuai standar Kementerian Perhubungan	100%		90%		-	80%		
		Prosentase Penurunan Angka Pelanggaran Angkutan Jalan	0%		11%		-	21%		
		Prosentase Ruas Jalan yang terlayani Trayek Angkutan Kota	22%		20%		-	18%		
		Prosentase Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji Berkala	99%		98%		-	97%		
		Prosentase Pemenuhan-Dokumen Kajian Bidang Perhubungan	20%		20%		-	20%		
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Kegiatan rencana induk rencana LL AJ	90		0%		-	0%		
2.15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen rencana induk jaringan LL AJ di Kota Probolinggo	1		0		-	0 Dokumen		
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perlengkapan jalan	90		90%		-	90%		
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan yang terbangun	43		1 Unit		-	0 Unit		
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Pemenuhan Rehabilitasi dan pemeliharaan	8		8 Unit		-	2 Unit		





		prasaranan jalan Non Elektrikal									
2.15.02.2.02.03	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemenuhan alat Perlengkapan Jalan Elektrikal	1		43 Unit		-	5 Unit			
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Pemenuhan Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan Elektrikal	1500		1500 Unit		-	1000 Unit			
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Percentase Kendaraan yang menggunakan Fasilitas Parkir Angkutan Barang	90		90%		-	75%			
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir ewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan yang masuk Fasilitas Parkir Angkutan Barang	8200		8100 Unit		-	8000 Unit			
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang laik jalan	94		92%		-	80%			
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana PKB yang terpenuhi	1		0 Unit		-	1 Unit			
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji	8.500		8.250 Unit		-	8.000 Unit			
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji Elektronik yang tersedia	5.000		5.000 Set		-	3,000 Set			
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian dalam kondisi baik	9		9 Unit		-	9 Unit			
2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang Lulus Uji/Laikjalan	8.942		8.892 Unit		-	8,842 Unit			
2.15.02.2.02.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Percentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana jaringan jalan di wilayah kota	80		77%		-	70%			
2.15.02.2.02.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jaringan Jalan Kota	4		4 Dokumen		-	-			





2.15.02.2.02.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Prosentase Penyediaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka MRL	70		70%		-	40%		
2.15.02.2.02.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	2		2 Lokasi		-	0 Lokasi		
2.15.02.2.02.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan LLAJ	85		83 Lokasi		-	83 Lokasi		
2.15.02.2.02.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembahasan Kebijakan LLAJ	12		8 Kebijakan		-	8 Kebijakan		
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Percentase Pelaku Usaha yang taat Andalalin	30		30%		-	0 pelaku usaha		
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Pelaku Usaha yang diberikan rekomendasi Andalalin	0		0		-	0 Pelaku Usaha		
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Pelaku Usaha yang melaksanakan Andalalin sesuai rekomendasi	1 pelaku usaha		1 Pelaku Usaha		-	0 Pelaku Usaha		
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Angkutan Penumpang umum di Kota Probolinggo	18.78%		15.65%		-	12,52%		
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Orang dan Angkutan Barang	5.803 Kendaraan		1.750 Kendaraan		-	1.500 Kendaraan		
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Percentase jaringan trayek perkotaan yang ditetapkan	16.67%		15,69%		-	15,69%		
2.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	50 Orang		50 Orang		-	50 Orang		
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Percentase penerbitan izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek	85		75%		-	75%		
2.15.02.2.14.02	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan	Jumlah Dokumen Perusahaan Angkutan Jalan yang melakukan	204		204 Dokumen		-	204 Dokumen		





	Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	pengurusan ijin Angkutan Orang dalam Trayek									
2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek yang diterbitkan	204		204 Dokumen		-	204 Dokumen			
2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kesesuaian tarif Angkutan kota	90		100%		-	100%			
2.15.02.2.16.03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Kota yang diawasi	204		204 Unit		-	204 Unit			
							-				
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Prosentase Jumlah Pelanggaran Kapal dibawah 7GT	1%		2%		-	2%			
2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemilik Kapal <7GT yang taat keselamatan pelayaran	74%		72%		-	70%			
2.15.03.2.01..02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan/Pemilik Kapal <7GT yang memiliki dokumen dan alat keselamatan berlayar	52		52 Orang		-	52 Orang			
		Jumlah Nelayan/ Pemilik Kapal <7GT yang mendapatkan pembinaan	60		60 Orang		-	60 Orang			





2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan pemerataan pembangunan Pemerintah membagi urusan pemerintahan dengan 2 (dua) urusan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Yang didalamnya memuat urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Probolinggo, salah satunya penanganan urusan di bidang perhubungan.

Dalam melaksanakan urusan wajib di bidang perhubungan, pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program-program pembangunan perhubungan daerah dan juga diperlukan adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan dasar bagi terwujudnya capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap bidang atau urusan wajib yang menjadi tugas pokoknya.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator kinerja dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Probolinggo ditetapkan sesuai dengan indikator kinerja dan sasaran pada RENSTRA 2019-2024 adalah untuk mewujudkan misi "*Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan*" ditetapkan tujuan "**Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur**" dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a) Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo;
- b) Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo;
- c) Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi Standar Keselamatan;



- d) Persentase Angkutan Laut yang memenuhi Standar Keselamatan.

Hasil analisa kinerja pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan kepada para masyarakat pengguna jalan berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, bisa dilihat pada tabel berikut:





Tabel TC-30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kota Probolinggo

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Sarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo	66%	67%	68%	69%	70%	40,93%	41,86%	1%	1%	
2	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo	24%	23%	22%	21%	20%	81,13%	40%	1%	1%	
3	Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi Standar Keselamatan	96%	97%	98%	99%	100%	57,67%	77,79%	1%	1%	
4	Persentase Angkutan Laut yang memenuhi Standar Keselamatan	85%	86%	87%	88%	89%	0%	0%	1%	1%	





2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang ada secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan di Bidang Perhubungan dapat di identifikasi sebagai berikut :

1. Implementasi pembangunan gedung UPT PKB dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya
2. sebagai prasarana dan aset Pemerintah Kota guna meningkatkan Keselamatan Jalan dalam bidang pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor khususnya angkutan laik jalan.
3. Peningkatan penyediaan fasilitas keselamatan jalan (pedestrian, zona selamat sekolah, jembatan penyeberangan orang, zebra cross, dll).
4. Peningkatan penyediaan sarana prasarana perhubungan dalam mendukung keselamatan berlalu lintas berbasis IT.
5. Peningkatan penyediaan PJU khususnya di wilayah selatan.





2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir OPD

Tabel TC-31.
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023
Kota Probolinggo

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Dinas Perhubungan	Percentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	90%	8.644.612.904	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Dinas Perhubungan	Percentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	90%	7,047,990,359	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Percentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	88%	19,600,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Percentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	88%	20,725,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	6 Dokumen	16,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	6 Dokumen	17,925,200	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	4 Laporan	3,600,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	4 Laporan	2,799,800	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Percentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	5,667,801,249	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Percentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	5,431,597,167	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	Percentase Realisasi Gaji dan	100%	5,494,621,249	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah orang yang menerima	528 orang/bulan	5,255,869,867	





			Tunjangan ASN yang tepat waktu					Gaji dan tunjangan ASN			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perhubungan	Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	100%	160,246,500	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perhubungan	Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	100%	170,294,900	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	7 Laporan	12,933,500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	9 Laporan	5,432,400	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Persentase penghapusan BMD yang tidak berfungsi/rusak berat	12 Dokumen	19,800,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Persentase penghapusan BMD yang tidak berfungsi/rusak berat	0	0	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen peatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	12 Dokumen	19,800,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen peatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	0	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	40%	80,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan	40%	30,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Perhubungan	Persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai	50%	30,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Perhubungan	Persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai	50%	30,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perhubungan	Presentase Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	50,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perhubungan	Presentase Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	100%	242.447.150	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	100%	156,318,550	





	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	100%	39,608,150	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100%	39,608,150	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perhubungan	Persentase Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi	199 Buah	19,671,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perhubungan	Persentase Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi	100%	14,742,400	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perhubungan	Persentase realisasi barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	100%	14,168,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perhubungan	Persentase realisasi barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100%	14,168,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perhubungan	Jumlah realisasi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	48 Eksemplar	4,800,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan penggandaan yang terpenuhi	36 Eksemplar	3,600,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perhubungan	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	100%	14,200,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perhubungan	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	100%	14,200,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perhubungan	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	150,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perhubungan	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	70,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah Penyediaan BMD Perangkat Daerah	2 unit	900,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perhubungan	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	10,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan	Jumlah realisasi kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	1 Unit	700,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan	Jumlah realisasi kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	0	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Realisasi Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	200,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	10,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perhubungan	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	100%	1,114,657,755	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perhubungan	Persentase kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi	100%	878,269,192	





	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perhubungan	Persentase Jasa Surat Menyurat yang terpenuhi	100%	5,675,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perhubungan	Persentase Jasa Surat Menyurat yang terpenuhi	100%	6,175,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perhubungan	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	100%	346,148,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perhubungan	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	100%	172,755,672	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Persentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi	100%	6,875,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Persentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi	100%	6,875,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	100%	755,959,755	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	100%	692,463,520	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perhubungan	Persentase BMD yang terpenuhi	100%	550.306.750	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perhubungan	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	521,080,450	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perhubungan	Presentase Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam kondisi layak	100%	43,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perhubungan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	41,393,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam kondisi layak	100%	412,886,750	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	31 Unit	435,534,950	
	Pemeliharaan Mebel	Dinas Perhubungan	Persentase Mebel dalam kondisi baik	100%	100,000	Pemeliharaan Mebel	Dinas Perhubungan	Jumlah Mebel yang dipelihara	0	0	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya dalam kondisi baik	100%	20,220,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	17 Unit	20,315,000	





	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dinas Perhubungan	Persentase Aset Tetap Lainnya dalam kondisi baik	100%	24,100,000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	4 Unit	23,837,500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	Persentase Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dalam kondisi baik	100%	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	0	0	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Prosentase Sarana dan Prasarana Perlengkapan jalan sesuai standar Kementerian Perhubungan	90%	30,335,113,650	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Prosentase Sarana dan Prasarana Perlengkapan jalan sesuai standar Kementerian Perhubungan	90%	20,667,872,284	
			Prosentase Penurunan Angka Pelanggaran Angkutan Jalan	11%				Prosentase Penurunan Angka Pelanggaran Angkutan Jalan	11%		
			Prosentase Ruas Jalan yang terlayani Trayek Angkutan Kota	20%				Prosentase Ruas Jalan yang terlayani Trayek Angkutan Kota	20%		
			Prosentase Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji Berkala	98%				Prosentase Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji Berkala	98%		
			Prosentase Pemenuhan Dokumen Kajian Bidang Perhubungan	20%				Prosentase Pemenuhan Dokumen Kajian Bidang Perhubungan	20%		
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Kajian Bidang Perhubungan	90%	130,000,000	Penetapan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Kajian Bidang Perhubungan	0	0	
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan di Bidang Perhubungan	1 Dokumen	130,000,000	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan di Bidang Perhubungan	0	0	





	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Prosentase Pemenuhan Perlengkapan jalan	90%	15.773.800.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Prosentase Pemenuhan Perlengkapan jalan	90%	15,438,178,784	
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Prasarana Jalan yang terbangun	1 Unit	50,000,000	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Prasarana Jalan yang terbangun	3 Unit	300,000,000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dinas Perhubungan	Jumlah prasarana jalan yang dipelihara	8 Unit	50,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dinas Perhubungan	Jumlah prasarana jalan yang dipelihara	0	0	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang diadakan	43 Unit	843,000,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang diadakan	43 Unit	1,819,700,000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang dipelihara	1500 Unit	14.830.800.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang dipelihara	1500 Unit	13,318,478,784	
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Dinas Perhubungan	Persentase Angkutan Kota yang terlayani Terminal tipe C	75%	250.000.000	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Dinas Perhubungan	Persentase Angkutan Kota yang terlayani Terminal tipe C	0	0	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Terminal Penumpang Tipe C	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Terminal Penumpang Tipe C	0	0	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Dinas Perhubungan	Persentase pengawasan pengelolaan parkir di Kota Probolinggo	90%	998,470,000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Dinas Perhubungan	Persentase pengawasan pengelolaan parkir di Kota Probolinggo	90%	786,250,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Kendaraan yang masuk Fasilitas Parkir Angkutan Barang	8100 Unit	998,470,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Kendaraan yang masuk Fasilitas Parkir Angkutan Barang	8100 Unit	786,250,000	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPT Pengujian	Presentase Kendaraan Bermotor Wajib	92%	368.262.400	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPT Pengujian	Presentase Kendaraan Bermotor Wajib	92%	261,534,400	





		Kendaraan Bermotor	Uji yang laik jalan				Kendaraan Bermotor	Uji yang laik jalan			
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana PKB	1 Unit	10,000,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana PKB	0	0	
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Data Kendaraan Wajib Uji	8.250 Unit	46.970.000	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Data Kendaraan Wajib Uji	8.250 Unit	35,000,000	
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji Elektronik yang tersedia	5.000 Set	125.000.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji Elektronik yang tersedia	5.000 Set	62,500,000	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian dalam kondisi baik	9 Unit	46,500,000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian dalam kondisi baik	9 Unit	46,500,000	
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang Lulus Uji/Laikjalan	8.892 Unit	149.692.400	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang Lulus Uji/Laikjalan	8.892 Unit	117,534,400	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana jaringan jalan di wilayah kota	77%	2,784,902,250	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana jaringan jalan di wilayah kota	77%	4,097,901,000	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jaringan Jalan Kota	4 Dokumen	50.000.000	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jaringan Jalan Kota	0	0	
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Prosentase Penyediaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka MRL	70%	366,116,250	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Prosentase Penyediaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka MRL	70%	1,664,325,000	
	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Manajemen	2 Lokasi	2.500.000	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan	Dinas Perhubungan	Jumlah lokasi pelaksanaan manajemen dan	2 Lokasi	2,500,000	





	Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Dan Rekayasa Lalu Lintas			Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		rekayasa lalu lintas			
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Lokasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan LLAJ	83 Lokasi	2,390,306,000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan LLAJ	83 Lokasi	2,427,076,000	
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan LLAJ	8 Kebijakan	28,380,000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Pembahasan Kebijakan LLAJ	8 Kebijakan	4,000,000	
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Andalalin yang dibutuhkan	30%	60.000.000	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Persentase Pelaku Usaha yang taat Andalalin	30%	30,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Dinas Perhubungan	Jumlah Pelaku Usaha yang diberikan rekomendasi Andalalin	10 Pelaku Usaha	30.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Dinas Perhubungan	Jumlah Pelaku Usaha yang diberikan rekomendasi Andalalin	0	0	
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Dinas Perhubungan	Jumlah Pelaku Usaha yang melaksanakan Andalalin sesuai rekomendasi	10 Pelaku Usaha	30.000.000	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Dinas Perhubungan	Jumlah Pelaku Usaha yang melaksanakan Andalalin sesuai rekomendasi	10 Pelaku Usaha	30.000.000	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Persentase Angkutan Penumpang umum di Kota Probolinggo	15.65%	5,475,000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Persentase Angkutan Penumpang umum di Kota Probolinggo	15.65%	5,475,000	
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kota yang tertib Administrasi	1.750 Kendaraan	5,475,000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Angkutan Orang dan Angkutan Barang	1.750 Kendaraan	5,475,000	
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Persentase jaringan trayek perkotaan yang ditetapkan	15,69%	2,500,000	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Persentase jaringan trayek perkotaan yang ditetapkan	15,69%	2,500,000	
	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum	Dinas Perhubungan	Jumlah Peserta Sosialisasi	50 Orang	2,500,000	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum	Dinas Perhubungan	Jumlah Peserta Sosialisasi	50 Orang	2,500,000	





	Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan			Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan			
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Percentase penerbitan izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek	75%	56,904,000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Percentase penerbitan izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek	75%	46,033,100	
	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perusahaan Angkutan Jalan yang melakukan pengurusan ijin Angkutan Orang dalam Trayek	204 Dokumen	3,500,000	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perusahaan Angkutan Jalan yang melakukan pengurusan ijin Angkutan Orang dalam Trayek	204 Dokumen	3,500,000	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek yang diterbitkan	204 Dokumen	53,404,000	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek yang diterbitkan	204 Dokumen	42,533,100	
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Prosentase Kesesuaian tarif Angkutan kota	100%	2.500,000	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Prosentase Kesesuaian tarif Angkutan kota	0	0	
	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Angkutan Kota yang diawasi	204 Unit	2.500,000	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Angkutan Kota yang diawasi	0	0	
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan	Prosentase Jumlah Pelanggaran Kapal dibawah 7GT	2%	10,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan	Prosentase Jumlah Pelanggaran Kapal dibawah 7GT	2%	9,999,800	
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang	Dinas Perhubungan	Percentase Pemilik kapal	72%	10,000,000	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang	Dinas Perhubungan	Percentase Pemilik Kapal	72%	9,999,800	





Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota		<7GT yang taat keselamatan pelayaran			Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota		<7GT yang taat keselamatan pelayaran			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Nelayan/Pemilik Kapal <7GT yang memiliki dokumen dan alat keselamatan berlayar	52 Orang	5,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Nelayan/Pemilik Kapal <7GT yang memiliki dokumen dan alat keselamatan berlayar	52 Orang	9,999,800	
		Jumlah Nelayan/ Pemilik Kapal <7GT yang mendapatkan pembinaan	60 Orang	5,000,000			Jumlah Nelayan/ Pemilik Kapal <7GT yang mendapatkan pembinaan	60 Orang		
				38,989,726,554					27,725,862,443	

Proses reviu diatas untuk mengharmonisasikan antara perencanaan akhir dengan realisasi kebutuhan pada rancangan akhir RKPD sehingga terdapat korelasi yang kongkrit dalam proses penyusunan





2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai pelaksana tugas desentralisasi di bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dalam penyusunan program dan kegiatan dalam rangka pembangunan masyarakat Kota Probolinggo tidak terlepas dari adanya kegiatan musyawarah dalam penentuan program dan kegiatannya. Musyawarah tersebut dilaksanakan melalui kegiatan forum OPD dan MUSRENBANG (yang dilakukan dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dan Kota) guna menyaring aspirasi dan usulan kegiatan yang prioritas untuk mengatasi permasalahan yang ada guna maksimalnya pembangunan bidang perhubungan melalui program dan kegiatan yang efisien dan tepat sasaran serta didukung oleh masyarakat. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat terkait bidang perhubungan yang diakomodir oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel TC-32.
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Probolinggo

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kota Probolinggo			
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota				
	Pengadaan Warning Light di Jalan Kota	Jl. Bengawan Solo Gg.Jambu 3 no 12 RT. 02/ RW.03 (Rohmawati EP), Kota Probolinggo (Kademangan)	Pemasangan lampu traffic Light diperempatan Kedopok Jl. Mastrip	1 Unit	Rekomendasi : Akan ditindaklanjuti menyesuaikan anggaran Koefisien : 1 Unit Anggaran : 11.000.000
	Pembangunan PJU di Jalan Kota	Jalan Kelengkeng Sumber Wetan (BESIR), Kota Probolinggo (Kedopok)	Tidak adanya penerangan	2 titik	Rekomendasi : Akan ditindaklanjuti menyesuaikan anggaran Koefisien : 2 titik Anggaran : 22.000.000





	Pembangunan PJU di Jalan Kota				
	Pembangunan PJU di Jalan Kota	JL IKAN LUMBA-LUMBA Rt.05 Rw. 02 an. (HERI SUSILO), Kota Probolinggo	KONDISI GELAP TIDAK ADANYA PENERANGAN JALAN	1 Unit	Rekomendasi : Akan ditindaklanjuti menyesuaikan anggaran Koefisien : 1 Unit Anggaran : 11.000.000
	Pemeliharaan PJU di Jalan Kota	RT. 02 / RW. 05 (Bpk. Zainul), Kota Probolinggo (Kanigaran)	Tiang listrik yang nyetrum sehingga membahayakan warga	5 titik	Rekomendasi : Akan ditindaklanjuti menyesuaikan anggaran Koefisien : 5 titik Anggaran : 55000000
B	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				
	Pengadaan Cermin Tikungan	Pertigaan antara Jalan Supriadi, Jalan Gbernur Suryo dan Jalan Maramis, tepatnya di depan Gapura Perum Asabri RW.12 (Mohammad Teddy), Kota Probolinggo	Mohon bantuan sarana prasarana berupa cermin cembung atau jalur lambat untuk mengurangi resiko kecelakaan.	1 set	Rekomendasi : Akan ditindaklanjuti menyesuaikan anggaran Koefisien : 1 Set Anggaran : 4.800.000





BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Adapun sasaran Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu :

1. Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana transportasi darat agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihian ekonomi nasional.
2. Terwujudnya kelanjutan reformasi dan restrukturisasi (kelembagaan, sumber daya manusia dan peraturan perundang-undangan/regulatory reform) di bidang transportasi darat dalam rangka memberikan peluang yang sama secara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk ber-peranserta dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
3. Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa transportasi darat di kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai.
4. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa transportasi darat yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ada beberapa point yang selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, yaitu pengembangan jalur jaringan trayek angkutan jalan, pengembangan perlintasan Kereta Api sebidang dan Pengembangan fasilitas keselamatan lalu lintas di Jalur Jalan Nasional. Adapun yang menjadi faktor pendorong bagi upaya pencapaian tujuan / sasaran tersebut adalah adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah daerah Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dengan pemerintah Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dalam upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan berlalu lintas.





Dinas Perhubungan dan LLAJ Propinsi Jawa Timur dalam dokumen perencanaan mempunyai tujuan yaitu: "Meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia (SDM) Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan perhubungan menuju terwujudnya sistem transportasi yang selamat lancar dan nyaman. Adapun sasarannya sebagai berikut :

1. Tercapainya peningkatan kinerja sumber daya manusia perhubungan Jawa Timur.
2. Tercapainya peningkatan efektifitas dan efisiensi proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian transportasi yang terpadu.
3. Tercapainya peningkatan kualitas sarana prasana transportasi yang baik dan ramah lingkungan.
4. Tercapainya peningkatan pelayanan transportasi yang prima.
5. Tercapainya peningkatan akuntabilitas tata kelola Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur.

Ditinjau dari Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan dan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur diatas, setidaknya ada 3 sasaran yang mempunyai keselarasan dengan tugas yang akan diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, yaitu : peningkatan efektifitas dan efisiensi proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian transportasi yang terpadu, peningkatan kualitas sarana prasana transportasi yang baik dan ramah lingkungan dan peningkatan pelayanan transportasi yang prima. Faktor yang mungkin akan jadi hambatan bagi pelayanan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo yaitu kurangnya sarana pendukung fisik yang menunjang pembangunan sarana prasarana perhubungan dan keterbatasan SDM yang tersedia dalam mendukung pencapaian kinerja OPD. Sementara untuk pelayanan Angkutan masih ada hambatan dari faktor eksternal yang sifatnya non teknis karena kendala sosial dan kultural. Adapun faktor pendukung yang bisa membantu terlaksananya tugas yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, yaitu :

1. adanya koordinasi yang cukup baik pada pelaksanaan menghadapi Angkutan lebaran, natal dan tahun baru.





2. Adanya pemeliharaan Rambu atau penggantian Rambu yang sudah rusak/usang.
3. Adanya Pemeliharaan dan perbaikan jalan yang berlubang/rusak.
4. Ter-Inventarisasinya Kendaraan yang wajib uji menurut Jenis Kendaraan.
5. Adanya perubahan perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan.
6. Adanya Kesadaran pemilik/sopir angkutan umum yang memiliki wajib uji kendaraan secara berkala melalui Unit Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor secara cermat dan akurat sehingga mengurangi angka kecelakaan dan mengurangi pencemaran udara.
7. Tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan yang mendukung keselamatan berlalu lintas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra.
- b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.
- c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut:

"Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur"

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada





penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir Tahun 2024, Dinas Perhubungan Kota Probolinggo menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

Untuk mewujudkan tujuan “**Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur**”, maka ditetapkan sasaran :

1. Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
2. Meningkatnya Kualitas Sarana Transportasi Darat dan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Misi ... " . . . "								
1.	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur		Persentase Infratruktur Berkualitas Baik	92%	94%	96%	98%	100%
	Meningkatnya Ketertiban Dan Keamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan		Persentase Sarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo	66%	67%	68%	69%	70%





		Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo	24%	23%	22%	21%	20%
	Meningkatnya Kualitas Sarana Transportasi Darat dan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan	Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi Standar Keselamatan	96%	97%	98%	99%	100%
		Persentase Angkutan Laut yang memenuhi Standar Keselamatan	85%	86%	87%	88%	89%

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah sebagai penentuan tindakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, sehingga program merupakan suatu jenis rencana yang disusun lebih konkrit dan didalamnya terkandung sekumpulan kegiatan yang berbeda-beda akan tetapi menuju pada suatu tujuan yang sama. Berdasarkan hal tersebut diatas dan sesuai dengan prioritas pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2023 maka program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundungan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu





			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
			Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota





		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
			Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota

Berdasarkan rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 yang telah disesuaikan dengan kebutuhan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran pada aplikasi SIPD Dinas Perhubungan Tahun 2023, maka dibutuhkan dana sebesar Rp. 27,725,862,443,00. Dana tersebut terdiri 1 (satu) sumber dana yaitu:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kota Probolinggo, sebesar Rp. 27,725,862,443,00.

Sebagaimana terlampir dalam tabel berikut :





Tabel TC-33.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KOTA PROBOLINGGO

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar-Perhubungan								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Dinas Perhubungan	90%	7,047,990,359	APBD		90%	7,739,212,904
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Dinas Perhubungan	88%	20,725,000			90	23,200,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	Dinas Perhubungan	6 Dokumen	17,925,200			6 Dokumen	19,600,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	Dinas Perhubungan	4 Laporan	2,799,800			4 Laporan	3,600,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	Dinas Perhubungan	100%	5,431,597,167			100	5,667,801,249
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	528 orang/bulan	5,255,869,867			528 orang/bulan	5,494,621,249
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	Dinas Perhubungan	100%	170,294,900			100%	160,246,500
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Dinas Perhubungan	9 Laporan	5,432,400			7 Laporan	12,933,500
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan	Dinas Perhubungan	40%	30,000,000			40	30,000,000





	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai	Dinas Perhubungan	50%	30,000,000			50%	30,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	Dinas Perhubungan	100%	156,318,550			100%	263,047,150
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	Dinas Perhubungan	100%	39,608,150			100%	39,608,150
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi	Dinas Perhubungan	100%	14,742,400			100%	19,671,000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase realisasi barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	Dinas Perhubungan	100%	14,168,000			100%	14,168,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan penggandaan yang terpenuhi	Dinas Perhubungan	36 Eksemplar	3,600,000			36 esk	5,400,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	Dinas Perhubungan	100%	14,200,000			100%	14,200,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang terpenuhi	Dinas Perhubungan	100%	70,000,000			100%	170,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	Dinas Perhubungan	100%	10,000,000			100%	55,000,000
	Pengadaaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan	2 Unit	10,000,000			10 unit	55,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi	Dinas Perhubungan	100%	878,269,192			100%	1,115,482,755
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Jasa Surat Menyurat yang terpenuhi	Dinas Perhubungan	100%	6,175,000			100%	6,500,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	Dinas Perhubungan	100%	172,755,672			100%	346,148,000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi	Dinas Perhubungan	100%	6,875,000			100%	6,875,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	Dinas Perhubungan	100%	692,463,520			100%	755,959,755
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Dinas Perhubungan	100%	521,080,450			100%	584,681,750
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perhubungan	1 Unit	41,393,000			100%	45,000,000





	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Dinas Perhubungan	31 Unit	435,534,950			100%	425,261,750
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Dinas Perhubungan	0	0			1	100,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Dinas Perhubungan	17 Unit	20,315,000			100%	20,220,000
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Dinas Perhubungan	4 Unit	23,837,500			100%	24,100,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Dinas Perhubungan	0	0			100%	70,000,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase Sarana dan Prasarana Perlengkapan jalan sesuai standar Kementerian Perhubungan		90%	20,667,872,284	APBD		100%	16,971,646,712
		Prosentase Penurunan Angka Pelanggaran Angkutan Jalan		11%				0%	
		Prosentase Ruas Jalan yang terlayani Trayek Angkutan Kota		20%				22%	
		Prosentase Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji Berkala		98%				99%	
		Prosentase Pemenuhan Dokumen Kajian Bidang Perhubungan		20%				20%	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perlengkapan jalan	Dinas Perhubungan	90%	15,438,178,784			90%	12,271,637,950
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan yang terbangun	Dinas Perhubungan	3 Unit	300,000,000			43 unit	340,837,950
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Dinas Perhubungan	0	0			8 unit	50,000,000
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemenuhan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Elektrikal	Dinas Perhubungan	43 Unit	1,819,700,000			1	50,000,000





	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Pemenuhan Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan Elektrikal	Dinas Perhubungan	1500 Unit	13,318,478,784			1500	11,830,800,000
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Percentase Kendaraan yang menggunakan Fasilitas Parkir Angkutan Barang	Dinas Perhubungan	90%	786,250,000			90%	998,470,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	8100 Unit	786,250,000			8200	998,470,000
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang laik jalan	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	92%	261,534,400			94%	388,092,400
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana PKB yang terpenuhi	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	0	0			1	100,000
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	8.250 Unit	35,000,000			8500	66,700,000
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji Elektronik yang tersedia	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	5.000 Set	62,500,000			5000	125,000,000
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian dalam kondisi baik	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	9 Unit	46,500,000			9	46,500,000
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraaan yang Lulus Uji/Laikjalan	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	8.892 Unit	117,534,400			8942	149,692,400
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Percentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana jaringan jalan di wilayah kota	Dinas Perhubungan	77%	4,097,901,000			80%	3,198,725,362
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Prosentase Penyediaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka MRL	Dinas Perhubungan	70%	1,664,325,000			70	770,039,362
	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Dinas Perhubungan	2 Lokasi	2,500,000			2	2,500,000
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan LLAJ	Dinas Perhubungan	83 Lokasi	2,427,076,000			85	2,397,806,000





	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembahasan Kebijakan LLAJ	Dinas Perhubungan	8 Kebijakan	4,000,000			12	28,380,000
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang taat Andalalin	Dinas Perhubungan	30%	30,000,000			30%	100,000
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Pelaku Usaha yang melaksanakan Andalalin sesuai rekomendasi	Dinas Perhubungan	10 Pelaku Usaha	30,000,000			0	100,000
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angkutan Penumpang umum di Kota Probolinggo	Dinas Perhubungan	15.65%	5,475,000			18.78%	59,717,000
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Orang dan Angkutan Barang	Dinas Perhubungan	1.750 Kendaraan	5,475,000			5803	59,717,000
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan trayek perkotaan yang ditetapkan	Dinas Perhubungan	15,69%	2,500,000			16.67%	2,500,000
	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	Dinas Perhubungan	50 Orang	2,500,000			50	2,500,000
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek	Dinas Perhubungan	75%	46,033,100			85%	49,904,000
	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah pemenuhan Persyaratan perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Perhubungan	204 Dokumen	3,500,000			204	3,500,000
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Izin penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan kabupaten/kota	Dinas Perhubungan	204 Dokumen	42,533,100			204	46,404,000





	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Prosentase Jumlah Pelanggaran Kapal dibawah 7GT	Dinas Perhubungan	2%	9,999,800	APBD		1	8,469,607
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota	Percentase Pemilik Kapal <7GT yang taat keselamatan pelayaran	Dinas Perhubungan	72%	9,999,800			74	8,469,607
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan/Pemilik Kapal <7GT yang memiliki dokumen dan alat keselamatan berlayar	Dinas Perhubungan	52 Orang	9,999,800			52	4,269,607
		Jumlah Nelayan/ Pemilik Kapal <7GT yang mendapatkan pembinaan		60 Orang				60	4,200,000
Jumlah Total					27,725,862,443				24,719,329,223





BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2023 yang telah disesuaikan dengan kebutuhan program, kegiatan dan anggaran pada Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, maka dibutuhkan dana sebesar **Rp. 27,725,862,443,-** (*Dua Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*). Dari Rencara Total Anggaran tersebut, sumber dana yang dibutuhkan dari APBD.





Tabel TC-33.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KOTA PROBOLINGGO

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar-Perhubungan								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Dinas Perhubungan	90%	7,047,990,359	APBD		90%	7,739,212,904
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Dinas Perhubungan	88%	20,725,000			90	23,200,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	Dinas Perhubungan	6 Dokumen	17,925,200			6 Dokumen	19,600,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	Dinas Perhubungan	4 Laporan	2,799,800			4 Laporan	3,600,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	Dinas Perhubungan	100%	5,431,597,167			100	5,667,801,249
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	528 orang/bulan	5,255,869,867			528 orang/bulan	5,494,621,249
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	Dinas Perhubungan	100%	170,294,900			100%	160,246,500
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Dinas Perhubungan	9 Laporan	5,432,400			7 Laporan	12,933,500
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan	Dinas Perhubungan	40%	30,000,000			40	30,000,000





	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai	Dinas Perhubungan	50%	30,000,000			50%	30,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	Dinas Perhubungan	100%	156,318,550			100%	263,047,150
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	Dinas Perhubungan	100%	39,608,150			100%	39,608,150
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi	Dinas Perhubungan	100%	14,742,400			100%	19,671,000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase realisasi barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	Dinas Perhubungan	100%	14,168,000			100%	14,168,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan penggandaan yang terpenuhi	Dinas Perhubungan	36 Eksemplar	3,600,000			36 esk	5,400,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	Dinas Perhubungan	100%	14,200,000			100%	14,200,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang terpenuhi	Dinas Perhubungan	100%	70,000,000			100%	170,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	Dinas Perhubungan	100%	10,000,000			100%	55,000,000
	Pengadaaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan	2 Unit	10,000,000			10 unit	55,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi	Dinas Perhubungan	100%	878,269,192			100%	1,115,482,755
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Jasa Surat Menyurat yang terpenuhi	Dinas Perhubungan	100%	6,175,000			100%	6,500,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	Dinas Perhubungan	100%	172,755,672			100%	346,148,000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi	Dinas Perhubungan	100%	6,875,000			100%	6,875,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	Dinas Perhubungan	100%	692,463,520			100%	755,959,755
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Dinas Perhubungan	100%	521,080,450			100%	584,681,750
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perhubungan	1 Unit	41,393,000			100%	45,000,000





	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Dinas Perhubungan	31 Unit	435,534,950			100%	425,261,750
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Dinas Perhubungan	0	0			1	100,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Dinas Perhubungan	17 Unit	20,315,000			100%	20,220,000
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Dinas Perhubungan	4 Unit	23,837,500			100%	24,100,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Dinas Perhubungan	0	0			100%	70,000,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase Sarana dan Prasarana Perlengkapan jalan sesuai standar Kementerian Perhubungan		90%	20,667,872,284	APBD		100%	16,971,646,712
		Prosentase Penurunan Angka Pelanggaran Angkutan Jalan		11%				0%	
		Prosentase Ruas Jalan yang terlayani Trayek Angkutan Kota		20%				22%	
		Prosentase Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji Berkala		98%				99%	
		Prosentase Pemenuhan Dokumen Kajian Bidang Perhubungan		20%				20%	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perlengkapan jalan	Dinas Perhubungan	90%	15,438,178,784			90%	12,271,637,950
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan yang terbangun	Dinas Perhubungan	3 Unit	300,000,000			43 unit	340,837,950
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Dinas Perhubungan	0	0			8 unit	50,000,000
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemenuhan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Elektrikal	Dinas Perhubungan	43 Unit	1,819,700,000			1	50,000,000





	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Pemenuhan Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan Elektrikal	Dinas Perhubungan	1500 Unit	13,318,478,784			1500	11,830,800,000
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Percentase Kendaraan yang menggunakan Fasilitas Parkir Angkutan Barang	Dinas Perhubungan	90%	786,250,000			90%	998,470,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	8100 Unit	786,250,000			8200	998,470,000
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang laik jalan	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	92%	261,534,400			94%	388,092,400
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana PKB yang terpenuhi	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	0	0			1	100,000
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	8.250 Unit	35,000,000			8500	66,700,000
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji Elektronik yang tersedia	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	5.000 Set	62,500,000			5000	125,000,000
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian dalam kondisi baik	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	9 Unit	46,500,000			9	46,500,000
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang Lulus Uji/Laikjalan	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	8.892 Unit	117,534,400			8942	149,692,400
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Percentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana jaringan jalan di wilayah kota	Dinas Perhubungan	77%	4,097,901,000			80%	3,198,725,362
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Prosentase Penyediaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka MRLL	Dinas Perhubungan	70%	1,664,325,000			70	770,039,362
	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Dinas Perhubungan	2 Lokasi	2,500,000			2	2,500,000
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan LLAJ	Dinas Perhubungan	83 Lokasi	2,427,076,000			85	2,397,806,000





	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembahasan Kebijakan LLAJ	Dinas Perhubungan	8 Kebijakan	4,000,000			12	28,380,000
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang taat Andalalin	Dinas Perhubungan	30%	30,000,000			30%	100,000
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Pelaku Usaha yang melaksanakan Andalalin sesuai rekomendasi	Dinas Perhubungan	10 Pelaku Usaha	30,000,000			0	100,000
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angkutan Penumpang umum di Kota Probolinggo	Dinas Perhubungan	15.65%	5,475,000			18.78%	59,717,000
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Orang dan Angkutan Barang	Dinas Perhubungan	1.750 Kendaraan	5,475,000			5803	59,717,000
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan trayek perkotaan yang ditetapkan	Dinas Perhubungan	15,69%	2,500,000			16.67%	2,500,000
	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	Dinas Perhubungan	50 Orang	2,500,000			50	2,500,000
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek	Dinas Perhubungan	75%	46,033,100			85%	49,904,000
	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah pemenuhan Persyaratan perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Perhubungan	204 Dokumen	3,500,000			204	3,500,000
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Izin penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan kabupaten/kota	Dinas Perhubungan	204 Dokumen	42,533,100			204	46,404,000





	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Prosentase Jumlah Pelanggaran Kapal dibawah 7GT	Dinas Perhubungan	2%	9,999,800	APBD		1	8,469,607
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota	Percentase Pemilik Kapal <7GT yang taat keselamatan pelayaran	Dinas Perhubungan	72%	9,999,800			74	8,469,607
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan/Pemilik Kapal <7GT yang memiliki dokumen dan alat keselamatan berlayar	Dinas Perhubungan	52 Orang	9,999,800			52	4,269,607
		Jumlah Nelayan/ Pemilik Kapal <7GT yang mendapatkan pembinaan		60 Orang				60	4,200,000
				Jumlah Total	27,725,862,443				24,719,329,223





BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2023 ini disusun untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2023 merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi juga dimaksud sebagai media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo sehingga dapat diharapkan adanya umpan balik guna perbaikan kinerja di masa mendatang.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Probolinggo berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance dalam perspektif yang lebih luas maka Rencana Kerja (Renja) berfungsi sebagai perencanaan awal untuk meningkatkan kualitas kinerja yang berkelanjutan sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Kota Probolinggo.

Diharapkan dengan dukungan ketersediaan anggaran yang memadai akan dapat mencukupi rencana kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan kedepan, sehingga kinerja Dinas Perhubungan dalam memberikan layanan sektor Perhubungan dapat berjalan dengan maksimal kepada masyarakat.

